



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan ke-	: II (Dua)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Mendikbudristek RI
Hari/Tanggal	: Selasa, 7 November 2023
Pukul	: 13.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Agustina W Pramestuti, SS., MM /Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Penyerahan Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan. 2. Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai amanat Raker 13 September 2023 sebagai bahan pertimbangan persiapan APBN TA 2024. 3. Evaluasi program kerja dan anggaran Tahun 2023 (program prioritas nasional serta program prioritas K/L). 4. Membahas perkembangan isu-isu terkini (perundungan dan keamanan infrastruktur sekolah)
Hadir Komisi X DPR RI	: 33 dari 55 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: Nadiem Anwar Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.47 WIB oleh Agustina W Pramestuti, SS., MM./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbudristek RI serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi X DPR RI menyampaikan laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan kepada Mendikbudristek RI untuk ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan tindak lanjutnya kepada Komisi X DPR RI secara berkala, dimulai pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.
2. Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan rapat kerja kembali setelah Komisi X DPR RI menerima DIPA TA 2024, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
3. Kemendikbudristek RI menyampaikan bahwa realisasi anggaran pada APBN TA 2023 pertanggal 6 November 2023 baru mencapai 72,41 % atau sebesar Rp60,7 Triliun dari Pagu Harian sebesar Rp83,8 Triliun, dengan rincian sbb:

(dalam jutaan rupiah)

Unit Utama	Pagu Harian	Blokir	Realisasi SP2D (%)
Sekretariat Jenderal	35.217.887	-	27.755.000 (78,81%)
Inspektorat Jenderal	198.398	-	146.235 (73,71%)
Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen	2.350.675	2.540 (0,11%)	1.825.005 (77,64%)
Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan	1.014.942	-	851.494 (83,90%)
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	548.479	-	393.627 (71,77%)
Ditjen Kebudayaan	2.187.018	-	1.240.355 (56,71%)
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	3.259.285	-	2.257.644 (69,27%)
Ditjen Dikti, Riset dan Teknologi	31.849.230	327.655 (1,03%)	21.232.395 (66,67%)
Ditjen Pendidikan Vokasi	7.250.445	18.622 (0,26%)	5.037.031 (69,47%)
Total	83.876.359	348.817 (0,42%)	60.738.786 (72,41%)

Oleh karena itu, Komisi X DPR RI mendorong agar realisasi anggaran Kemendikbudristek RI dengan sisa anggaran sebesar Rp23,1 Triliun dapat sesuai target pada akhir Desember 2023.

4. Mengenai capaian program prioritas Merdeka Belajar 2023 pertanggal 6 November 2023, pada bahan paparan halaman 10-15, masih terdapat anggaran yang rendah realisasinya, antara lain:

Program	Kegiatan	Realisasi (%)
Pembiayaan Pendidikan	Tunjangan GTK Non PNS (TPG, TKG dan Insentif)	65,51 %

Program PAUD, Dikdas, Dikmen	Satuan Pendidikan mendapat pembinaan pendidikan kesetaraan	57,42 %
Program Pendidikan Vokasi	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Uji Kompetensi Profesi	30,11%
Program Pendidikan Tinggi	▪ Sarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi PHLN	28,24%
	▪ Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan PPG (Revitalisasi LPTK)	28,37%
	▪ SDM Dikti yang ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya PHLN	37,04%
Program Guru dan Tenaga Kependidikan	▪ Guru yang mengikuti sertifikasi guru	51,32%
	▪ GTK yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	55,74%
Program Pemajuan Kebudayaan	▪ Pelayanan Publik kepada masyarakat	16,03%
	▪ Desa Pemajuan Kebudayaan	31,50%
	▪ Cagar Budaya, ODCD dan OPK yang dilestarikan	26,04%
Kurikulum, Perbukuan dan Asesmen Pendidikan	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Asesmen	50,72%

5. Mengenai rendahnya realisasi anggaran sebagaimana angka 4 di atas, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengakselerasi langkah-langkah tindak lanjut terhadap kendala/permasalahan dari realisasi program prioritas nasional Kemendikbudristek tahun 2023 dan menekankan agar realisasi yang masih rendah untuk ditingkatkan sesuai target sampai akhir Desember 2023.
6. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk menyampaikan data rinci secara tertulis mengenai perubahan/penambahan anggaran pada APBN TA 2023 mulai pagu definitif sebesar 80,2 Triliun sampai pagu harian sebesar 83,8 Triliun, sebagai bahan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program serta anggaran tahun berjalan.
7. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan perkembangan tindak lanjut temuan BPK yang tercantum dalam LHP Kepatuhan atas belanja TIK TA 2020, 2021, 2022, sebagai bahan evaluasi pada program dan kegiatan yang sama pada tahun 2023 dan 2024.
8. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan kajian:
 - a. mengenai rasionalitas anggaran pendidikan berdasarkan jumlah peserta didik, per satuan pendidikan dan per wilayah, sebagai landasan penentuan alokasi anggaran pendidikan di daerah.
 - b. efektivitas pembangunan infrastruktur sekolah yang dibangun oleh KemenPU PR RI.
 - c. mengenai kebijakan guru yang komprehensif, khususnya mengenai tugas ideal seorang guru, K/L yang mengampu guru, dan kesejahteraannya.

9. Komisi X DPR RI menekankan kembali kepada Kemendikbudristek RI untuk:
- a. Adanya kebijakan mengenai hak guru yang seimbang baik guru di sekolah negeri maupun swasta.
 - b. secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap fenomena perundungan di satuan pendidikan dan meningkatkan program pendampingan terhadap para korbannya, serta meningkatkan kolaborasi dengan K/L lain dan organisasi kemasyarakatan.
 - c. segera melakukan asesmen terhadap satuan pendidikan yang infrastruktur pendidikannya tidak layak dan segera melakukan langkah tindak lanjut untuk menyelesaikannya agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran PIP, khususnya terkait lembaga penyalur.
 - e. setiap satuan pendidikan wajib memiliki tenaga kependidikan yang jelas status kepegawaiannya.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap permasalahan terkait GTK PPPK, seperti guru yang lulus tapi tanpa penempatan, gaji yang belum dibayar, lulus tapi belum dalam SK, dan komitmen pemda yang rendah untuk pengangkatan.
10. Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbudristek untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota yang belum terjawab, paling lambat 21 November 2023

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.21 WIB

MENDIKBUDRISTEK RI

KETUA RAPAT,

TTD.

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

AGUSTINA W. PRAMESTUTI, SS., MM.